

Proses Penyelesaian Sengketa Delimitasi Maritim di Laut Barents Antara Rusia dan Norwegia

Fiesta Ayu Wismiati¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, A.A Bagus Surya Widya Nugraha³⁾
¹⁾²⁾³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: itaayuw@gmail.com¹⁾, ratihkumaladewi@unud.ac.id²⁾, aabasuwinu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The writing of this thesis aims to describe the problem between two countries namely Norway and Russia regarding maritime delimitation conflicts that occur in the Barents sea. The background of this essay writing arises because of the potential contained in the Barents sea, which triggers the existence of different struggles and claims for the region. In addition, the natural wealth contained in the Barents sea is one of the most important places in the world. Natural resources in the region create profits to improve the economy for Russia and Norway, of course. With the conflict between Russia and Norway hampering economic activities to be carried out in the region. The two countries adhere to different principles to the delineation of maritime boundaries which make the journey to resolve this conflict last long. However, the conflict that lasted for 40 years was finally resolved by the two countries through the negotiation process. The following negotiation process will be explained in this paper.

Keyword : UNCLOS, Bilateral Agreement Process, Negotiation as a Peaceful Settlement Disputes

1. PENDAHULUAN

Konflik delimitasi maritim di Laut Barents dikenal sebagai perselisihan dua Negara antara Norwegia dan Rusia. Konflik delimitasi maritim merupakan konflik penentuan batas wilayah atau kekuasaan negara terhadap sebuah laut. Permasalahan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Pada tahun 2007 dilakukan lagi revisi terhadap perjanjian *Varanger Fjord* tahun 1957 dan hal tersebut membawa kontribusi positif. Sejarah proses delimitasi maritim dan perselisihan batas di Laut Barents cukup panjang. Puncaknya adalah Traktat yang ditandatangani di Murmansk pada tanggal 15 September 2010 yang dinamakan *Treaty between The Kingdom of Norway and The Russian Federation Concerning Maritime*

Delimitation and Cooperation. Parlemen Rusia dan Norwegia tidak membutuhkan waktu lama untuk meratifikasi traktat tersebut pada tahun 2011, dan secara tidak langsung menandakan mulai diberlakukannya semua kebijakan yang tercantum didalam traktat tersebut. Namun, berdasarkan klaim masing-masing kedua Negara yang berhubungan dengan *median line* dan *sector line* yang ingin digunakan tahun 1974 sangat kontras dengan kesepakatan dalam traktat dimana kedua Negara akhirnya tidak menggunakan kedua bentuk garis tersebut. Namun traktat tersebut menunjukkan bahwa ada komitmen dan kepentingan yang kuat untuk menyepakati penyelesaian sengketa tersebut.

Pengumuman ini menandai berakhirnya perselisihan delimitasi maritim yang telah ada antara Norwegia dan Rusia selama lebih dari 40 tahun dan melibatkan wilayah di Laut Barents dan Samudra Arktik yang luasnya sekitar 175.000 kilometer persegi. Daerah yang disengketakan tidak hanya besar, tapi juga penting secara ekonomi dan strategis (Heininen 2005, hal 92).

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan dua kajian pustaka sebagai berikut. Pertama adalah *Dispute Settlement Under the United Nations Convention on the Law of the Sea and Its Role in Oceans Governance*, di tulis oleh Anshuman Chakraborty (2006). Tulisan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan mekanisme penyelesaian sengketa sebagian besar tergantung pada penggunaan aktual yang dibuat oleh negara. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian sengketa yang pernah dilakukan harus mampu menyelesaikan sengketa secara obyektif atas dasar hukum, keadilan serta menjunjung tinggi prinsip dan ketentuan LOSC. Diharapkan bahwa negara-negara akan meminta bantuan seperti yang dicantumkan pada Bagian XV lebih terperinci dengan tujuan menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, dan bahwa ketentuan penyelesaian perselisihan pada gilirannya akan memenuhi mandate mereka.

Kajian pustaka yang kedua adalah tesis yang ditulis oleh Jamine (2007) dengan judul *Maritime Boundaries Delimitation, Management and Dispute Resolution*. Tesis berikut membahas pentingnya memperjelas peran tim untuk setiap fase dan untuk menentukan peran spesifik masing-masing tim dengan mengklarifikasi kapan mereka harus bertindak, dan kapan setiap tindakan berakhir. Dalam Tesis Jamine (2007) ini menjelaskan mengenai Konsep *Principles of Negotiations* dalam proses negosiasi dan akhir dari perjanjian yang akan membantu penulis dalam membedah permasalahan di laut Barents antara Rusia dan Norwegia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa zona maritim di Laut Barents antara Rusia dan Norwegia melalui konsep yang dijabarkan diatas melalui interpretasi data-data atau informasi yang diperoleh peneliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur, artikel, jurnal, berita, laporan, situs resmi terkait isu penelitian. Teknik penyajian data yang digunakan merupakan penyusunan sekumpulan data yang telah didapatkan dan direduksi yang member

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Silalahi, 2012). Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks atau narasi, tabel, serta gambar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yang dibagi atas gambaran umum penelitian yang berisi penjelasan mengenai laut Barents secara garis besar. Seperti sejarah bermulanya sengketa antara kedua negara tersebut. Sub bab berikut membahas mengenai pandangan Rusia dan Norwegia mengenai potensi yang terkandung di dalam laut Barents. Wilayah daratan dan laut di Utara Tinggi Eropa di dominasi oleh Norwegia dan Rusia. Lisensi pertama untuk eksplorasi minyak dan gas di Laut Barents Norwegia diberikan pada tahun 1980, yang mengarah kepenemuan *Snøhvit* pada tahun 1984. Sub bab selanjutnya antara lain membahas mengenai kepentingan Norwegia dan Rusia di laut Barents.

Kepentingan nasional Norwegia dan Rusia sendiri secara eksplisit tidak membawa politik makro domestic yang kuat, dan kekuatan terhadap peningkatan lebih lanjut dalam tingkat produksi dan pengembangan laut Barents. Namun situasi tersebut menimbulkan tantangan besar di dalam negeri, sehubungan dengan menciptakan kebijakan industry makro, ekonomi dan social alternatif. Terlepas dari

industry perminyakan dan beberapa kepentingan regional, kepentingan ekonomi domestic Norwegia tidak selalu berbagi logika dan menekankan pada perluasan sektor minyak bumi lebih jauh lagi. Sebaliknya, mereka menginginkan terciptanya industri yang lebih kompetitif di sektor lain dan pengembangan masyarakat luas.

Norwegia dan Rusia telah berkompetisi di pasar energi sejak tahun 1970-an, tetapi kepatuhan mereka terhadap kutub ekonomi dan politik yang berlawanan berorientasi pada ekspor ke pasar yang berbeda. Minyak dan gas Norwegia hampir seluruhnya diarahkan ke negara-negara Eropa Barat (dan beberapa minyak ke negara AS), sementara lebih dari separuh ekspor Soviet dikhususkan untuk Eropa Timur dan Republik Soviet. Setelah *break-up*, Rusia telah meningkatkan ekspornya ke Eropa Barat. Kesadaran politik akan kepentingan bersama dalam perkembangan pasar, harga dan ketentuan kontraktual antara Norwegia dan Rusia menjadi lebih kuat pada tahun 1990-an. Ketika Rusia bergerak (perlahan) menuju ekonomi pasar dan integrasi ke dalam Uni Eropa dan ekonomi dunia, dia menyatu dengan kebijakan minyak Norwegia di beberapa wilayah (Austvik & Tsygankova, 2004).

Norwegia dan Rusia sudah berbagi posisi di pasar gas Eropa, dengan Rusia sebagai

pemimpin. Produksi gas Norwegia mencapai 85 BCM di tahun 2005. Sementara produksi minyak Norwegia diperkirakan mencapai puncak pada 3,3 mbd (*million barrels per day*) ditahun 2004, potensi produksi gas alamnya lebih tinggi sebesar 100 BCM pertahun dalam beberapa tahun. Bersamaan dengan produksi minyak yang tinggi dan harga minyak yang tinggi, pertumbuhan ekspor gas alam akan memberikan peran yang lebih tinggi dan harga minyak yang tinggi, pertumbuhan ekspor gas alam akan memberikan peran yang lebih penting dalam perekonomian Norwegia di sektor minyak. Sekarang terdapat sedikit konflik antara kepentingan Internasional dalam meningkatkan produksi gas alam dan kepentingan domestik seperti yang dinyatakan sebelumnya menempatkan pembatasan pada tingkat produksi untuk menghindari masalah dalam perekonomian Norwegia, dan penciptaan *Petroleum Fund* pada tahun 1990-an menghilangkan banyak kebingungan mereka terhadap tingkat produksi yang terlalu tinggi.

Norwegia telah mengembangkan dan memelihara administrasi perminyakan yang sangat profesional yang dipimpin oleh Kementerian Perminyakan dan Energi. Kementerian dan badan-badan dibawahnya, bersama dengan kementerian keuangan telah cukup berhasil dalam membuat pengaturan

industri yang efisien dan untuk kepentingan pemerintah dan perusahaan Norwegia. Kepentingan industri tampaknya menjadi lebih penting dalam definisi tingkat produksi Norwegia yang relevan. Lebih jauh lagi pemerintah-pemerintah lain menyatakan keinginan untuk mempercepat perkembangan dari perspektif *security-of-supply*, yang mempengaruhi Kementerian Luar Negeri dan menjadi bagian eksplisit dari kebijakan luar negeri Norwegia.

Berdasarkan dengan ketentuan yang dijelaskan mengenai sengketa delimitasi maritim antara Rusia dan Norwegia bahwa Rusia dan Norwegia tidak sama sekali menggunakan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Begitu juga dengan bentuk penyelesaian mereka yang mengambil jalan damai dalam hal ini. Jalan damai yang dimaksud adalah Negosiasi. Negosiasi menjadi ketentuan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang. Dengan demikian sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai.

Laut Barents sendiri menyimpan cadangan gas alam yang besar. Bidang gas kelas dunia telah terbukti di kedua sektor Rusia dan dengan penemuan oleh Rusia yang sangat mengesankan. Meskipun ada beberapa kekecewaan, Laut Barents hanya sedikit

dieksplorasi, dan harapan keseluruhan untuk penemuan hidrokarbon tetap tinggi. Potensi penemuan dan kemungkinan pengembangan cadangan minyak bumi bagaimanapun harus dilihat dengan latar belakang sumber daya laut yang penting di wilayah tersebut dan kepekaan lingkungan yang diketahui. Keprihatinan public atas isu-isu konservasi dibagi oleh sebagian besar pekerja perusahaan minyak yang tentu saja tidak ingin melihat beberapa bencana tumpahan minyak di wilayah arktik yang terjadi secara berulang di Laut Barents.

Sub bab berikutnya juga membahas UNCLOS sebagai peran besar dalam penyelesaian sengketa delimitasi maritim di laut Barents dan penyelesaian sengketa yang diisyaratkan UNCLOS bagi negara-negara yang telah meratifikasi. Dalam hal ini, untuk memastikan konservasi dan penggunaan sumber daya yang adil di wilayah laut, serta menjamin perlindungan dan kelestarian sumber daya alam yang terkandung dalam laut. UNCLOS sebagai hukum laut utama juga membahas hal-hal lain seperti kedaulatan, hal dalam penggunaan zona maritim, dan hak-hak navigasi. UNCLOS menyediakan rezim yang kompleks yakni persetujuan tentang ruang kelautan serta penggunaannya.

Persetujuan batas laut dan yuridiksi dari semua daerah pantai meliputi laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, laut

pedalaman, batas laut dalam begitu pula ruang diatas lautan. Konferensi Negara-negara di dunia memberikan hak serta kewajiban untuk semua Negara untuk member penghormatan dalam menjalankan aktivitas di area kelautan. Dalam satu sisi, adanya kerjasama dari Negara-negara dalam melakukan kerjasama dan negosiasi dalam membuat suatu perjanjian yang memiliki hubungan dengan masalah laut (Filipek & Hruzdou, 2011). Kedua belah pihak meratifikasi UNCLOS (Norwegia pada tahun 1996 dan Rusia pada tahun 1997). Ini menyebabkan modifikasi aturan yang berlaku untuk pembatasan landas kontinen dan ZEE. Sejak itu, ketentuan Pasal 73 dan 84 UNCLOS berlaku untuk sengketa. Pada tahap negosiasi ini para pihak sepakat bahwa tujuan mereka adalah untuk menetapkan batas tunggal untuk ZEE dan landas kontinen di area dalam 200 nm dari garis pantai yang relevan.

Hal ini menjadi alasan mengapa Rusia dan Norwegia mengacu pada UNCLOS dan dipilihnya cara bilateral bukan penyelesaian dengan sistem lainnya. Kesepakatan bilateral itu penting dalam beberapa cara. Ini merupakan kontribusi penting bagi perkembangan hukum internasional mengenai batasan batas, berkontribusi pada praktek negara di bidang ini. Juga, seperti yang disebutkan di atas, secara politik signifikan di tingkat global dalam menunjukkan bahwa

perselisihan tersebut - di mana ada sekitar 400 sengketa berskala global (Anderson, 2006) dapat diselesaikan dengan cara damai. Beberapa pengamat telah memprediksi bahwa masalah perbatasan yang belum terselesaikan di Arktik mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan ini (Borgerson, 2008). Tetapi pengalaman umum di Arktik adalah bahwa batas-batas diselesaikan secara damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional (Hoel, 2009).

Kesepakatan Norwegia - Rusia juga dapat dilihat sebagai hal yang mendukung UNCLOS di wilayah Kutub Utara pada tingkat yang lebih umum. UNCLOS-lah yang memberikan hak sumber daya eksklusif kepada negara-negara pantai. Baik Rusia atau pun Norwegia akan banyak kehilangan jika otoritas UNCLOS menjadi lemah. Dengan situasi es Arktik yang berubah dengan (Parkinson 2008, hlm. 3, 11) serta penataan kembali politik internasional termasuk kebangkitan kekuatan baru seperti China dan meningkatnya minat terhadap Arktik di pihak UE dan AS yang menyemen UNCLOS di Arktik menjadi lebih mendesak bagi Rusia. Pada tahun-tahun segera sebelum 2010 ada diskusi internasional tentang perlunya kerangka kerja tata kelola baru untuk Arktik, mungkin dalam bentuk Perjanjian Arktik internasional baru (Stokke 2007).

UNCLOS dalam hal ini menjadi satu-satunya dasar pedoman dan *Bilateral Agreement* sebagai penyelesaian sengketa delimitasi maritim di laut Barents. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tentang masalah ini melalui negosiasi yang dilakukan dengan baik. Konvensi 1958 tentang Landas Kontinen menyediakan landasan hukum untuk batas garis median dari landas kontinen serta zona ekonomi eksklusif. Dengan ditandatanganinya perjanjian batas maritim antara Rusia dan Norwegia juga telah memperkuat hubungan antar kedua Negara yang merupakan langkah kearah yang positif. Garis batas yang jelas dianggap penting untuk semua pemakai laut, terutama di wilayah yang berdekatan dengan pantai. Hal ini juga membantu memastikan prediktabilitas dan stabilitas yang lebih baik. Negosiasi dilakukan dengan semangat konstruktif.

Proses ini dan kesepakatan yang kini telah dicapai dapat berkontribusi secara positif terhadap upaya demi mencapai kesepakatan mengenai klaim area yang tumpang tindih terhadap laut Barents. Kedua Negara Rusia dan Norwegia telah setuju untuk memprioritaskan untuk melanjutkan negosiasi lebih lanjut tentang masalah delimitasi maritim. Negosiasi menjadi cara paling penting untuk mengelola hubungan antar Negara, dan batas maritim tidak terkecuali. Negosiasi sendiri

dilihat sebagai pilihan yang disukai sebagai cara untuk menyetujui batas-batas maritim.

Setelah hampir 40 tahun pembicaraan, pada 27 April 2010, Norwegia dan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui batas di Laut Barents. Acara tersebut adalah kunjungan kenegaraan oleh presiden Dmitry Medvedev, dan "Pernyataan Bersama tentang maritim dan kerjasama di Laut Barents dan Samudera Arktik" pada 27 April 2010 menjabarkan ketentuan perjanjian secara luas. Kesimpulan dari prosedur ratifikasi, perjanjian mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2011. Batas yang disepakati membagi area yang disengketakan sebesar 175.200 km² menjadi dua bagian yang sama sekitar 87.600 km², dengan garis batas sepanjang 1.680 kilometer.

Seperti halnya perjanjian batas maritim terbaru, Norwegia dan Rusia juga setuju untuk merundingkan pengaturan unitisasi kooperatif jika struktur hidrokarbon ditemukan mengangkang batas maritim. Kedua pemerintah telah memuji perjanjian yang mempercayai bahwa perjanjian tersebut akan memfasilitasi perijinan lepas pantai dan membuka jalan bagi eksplorasi hidrokarbon di masa depan sementara juga mempertahankan pengaturan perikanan koperasi yang berkembang selama beberapa dekade.

Kesepakatan tersebut akan diserahkan ke kedua parlemen nasional untuk diratifikasi.

Masuk ke dalam sub bab terakhir dalam penulisan ini adalah analisa penyelesaian sengketa delimitasi maritim menggunakan dua konsep cara antara lain *Bilateral Agreement Process* dan *Negotiation as a Peaceful Settlement Disputes*. Ada pun tahapan-tahapan *bilateral agreement* yang dilalui oleh Rusia dan Norwegia yaitu negosiasi menjadi tahapan pertama yang dilakukan oleh kedua negara. Negosiasi pertama yang membahas mengenai laut Barents ditahun 1957 yang menciptakan sebuah perjanjian yang disebut dengan *Varanger Fjord* tahun 1957. Pada tahun 2007 dilakukan lagi revisi terhadap perjanjian *Varanger Fjord* 1957 yang diklaim membawa kontribusi positif. Tahapan kedua yaitu penandatanganan yang dilaksanakan di tahun 2010 yang menciptakan sebuah traktat yang dinamakan *Treaty between The Kingdom and The Russian Federation Concerning Maritime Delimitation and Cooperation*. Tahap ketiga adalah pengesahan atau *ratification*. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Rusia dan Norwegia melakukan ratifikasi dimana hal tersebut dilakukan di tahun 2011 yang secara tidak langsung menandakan mulai diberlakukannya semua kebijakan yang ada di dalam traktat tersebut.

Kasus di sini mendukung pandangan ini. Pada tingkat regional, oleh karena itu perjanjian pertama-tama membuat baik janji-janji yang dibuat oleh negara-negara pantai ke Samudera Arktik dalam Deklarasi Ilulissat 2008, menyelesaikan masalah batas berdasarkan hukum laut internasional. Juga, perjanjian tersebut dapat memberikan contoh untuk penyelesaian masalah serupa antara negara-negara lain di Kutub Utara dan di tempat lain. Di tingkat bilateral, penetapan batas itu membuka jalan bagi pengembangan minyak di daerah yang sebelumnya disengketakan di Laut Barents.

Proses Negosiasi antara Rusia dan Norwegia memang berlangsung hampir 40 tahun. Namun focus dari tulisan ini adalah tahun 2007-2011 dimana itu berjarak 4 tahun dan hal itu termasuk dalam waktu yang tidak lama dalam sebuah hubungan bilateral serta sengketa yang di dasari dengan penyelesaian secara damai. Negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara tersebut berfokus pada penyelesaian yang berpedoman pada UNCLOS yang menjadi satu-satunya pedoman dan landasan hukum internasional dalam masalah laut Barents. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan solusi komprehensif untuk semua ini, mendefinisikan batas bilateral berdasarkan hukum internasional, melanjutkan kerja sama perikanan yang relative sukses, dan

membangun rezim untuk bagaimana deposit minyak bumi bersama dikelola. Di luar itu, perjanjian ini juga penting secara internasional karena menunjukkan bahwa negara-negara arktik bekerjasama berdasarkan hukum internasional, menetapkan prioritas penting untuk bagaimana masalah yang sama dapat diselesaikan.

Dalam konteks ini, negosiasi adalah prinsip dasar yang membawa berbagai pihak dengan kepentingan bersama yang berbeda. Arena internasional digambarkan sebagai atmosfer interdependen di mana negara-negara bergantung satu sama lain. Dalam liberalisme, negara dianggap dapat diandalkan satu sama lain dan harus memfasilitasi promosi perdamaian dan stabilitas dan kerja sama untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk mereka sendiri. Negara harus bernegosiasi dalam setiap tahap perselisihan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai (Dergizi, 2010).

Dalam sebuah permasalahan terutama sengketa mengenai batas maritim atau delimitasi maritim terdapat beberapa prinsip-prinsip yang digunakan sebagai metode penyelesaiannya. Apabila antara pihak yang bersengketa telah menemukan sebuah solusi yang tanpa harus melalui jalan kekerasan sebagai jalur penyelesaiannya dan prinsi

tersebut tercantum sebagaimana yang telah dipaparkan dalam piagam PBB dan begitu pula dalam perjanjian internasional. Salah satu metode jalan damai yang akan digunakan sebagai konsep yang membantu dalam penyelesaian permasalahan sengketa delimitasi maritim di laut Barents adalah dengan jalan negosiasi. Negosiasi merupakan perundingan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa, dimana perundingannya dilakukan tanpa adanya pihak ketiga. Seperti yang tercantum pada piagam PBB, pasal 33 ayat (1) yang mengarahkan negosiasi sebagai cara utama dan yang paling mendasar sebagai metode penyelesaian sengketa. Perundingan dalam hal ini mengedepankan sebuah pertukaran pandangan dan usul-usul antara pihak yang bersengketa menyelesaikan konflik sehingga tidak membutuhkan pihak ketiga.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa antara Rusia dan Norwegia dalam sengketa delimitasi maritim di laut Barents yang memfokuskan pada proses penyelesaiannya yang mengacu pada UNCLOS. Walaupun sebelumnya sengketa ini pernah mengalami *deadlock* yang cukup panjang selama kurun waktu 40 tahun, namun dari kedua negara sendiri berhasil untuk

melakukan kerjasama yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa delimitasi tersebut. Selain itu kerjasama berupa kegiatan eksplorasi kandungan di dalam laut Barents juga masuk dalam kesepakatan. Melalui Traktat yang disepakati juga berhasil membawa kedua negara untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara yang damai, sekaligus berakhirnya sengketa delimitasi antara Rusia dan Norwegia.

Kedua Negara menganggap negosiasi menjadi cara paling penting untuk mengelola hubungan antar Negara, dan batas maritim tidak terkecuali. Adapun penyelesaian sengketa delimitasi maritime antara Rusia dan Norwegia melalui beberapa hal yang melihat aspek-aspek yang tercantum di dalam hukum laut legal melalui UNCLOS tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari penyelesaian ini adalah kedua negara mendapat kewenangan untuk mengeksplorasi wilayah yang disengketakan dengan syarat apabila kedua negara mendapat temuan-temuan berupa sumber daya alam yang dicari maka kedua pihak diharuskan untuk memberitahu hal tersebut dengan pihak yang bersengketa.

6. DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Negotiating, note 25 at 132; The Implications of Expanding International Dispute Settlement Systems: The 1982 Convention on

the Law of the Sea, AJIL 90 (1996) 69-75 at 71.

Austvik, O. G. (2006, September 4). *Oil and gas in the High North - A perspective from Norway*. Retrieved October 29, 2018, from <http://www.kaldor.no>:
<http://www.kaldor.no/energy/berlin20060315-barents.html>

Brunet-Jailly, E. (nd). *A Global Encyclopedia - Border Disputes*. Santa Barbara California: ABC-CLIO.

Castonguay, N. (2017). The Efficiency of Institutions in Regards to Disputes within the Arctic: A Case Study of the Beaufort Sea and the Barents Sea Disputes. *Ecole Nationale D'administration Publique* .

CHAKRABORTY, A. (2006). DISPUTE SETTLEMENT UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA AND ITS ROLE IN OCEANS GOVERNANCE. *LLM THESIS* .

Davis, D. (2012). Arctic sovereignty disputes: international relations. *Calhoun Institutional Archive of the Naval Postgraduate School* .

Departement of European, P. a. (2014, November Thursday and Friday). *Ghent University*. Retrieved April Wednesday, 2018, from www.ugent.be:
<https://www.ugent.be/re/epir/en/researchgroups/public-international-law/research/conferences/unclos.htm>

Dergisi, V. (2010). SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN/AMONG STATES THROUGH "PEACEFUL" WAYS. *The Journal of Visionary*, pp.41-49

DORÉ, A. (1995). Arctic. *Barents Sea Geology, Petroleum Resources and Commercial Potential* , 207-221.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Cetakan I. Diterjemahkan oleh: Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Law and Best Practices for Maritime Boundary Delimitations, 2015)

JAMINE, E. B. (2006-2007). *MARITIME BOUNDARIES DELIMITATION, MANAGEMENT AND DISPUTE RESOLUTION*. NY: Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs.

Jaklin, G. S. (n.d.). *The Barents Sea*. Retrieved 10 18, 2018, from The Arctic System: (<http://www.arcticsystem.no/en/arctic-inc/barentssea.html>)

Government, S. 2. (2007, July 11). *Publisher Ministry of Foreign Affairs*. Retrieved October 10, 2018, from Agreement signed between Norway and Russia on maritime delimitation in the Varangerfjord area: <https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/Agreement-signed-between-Norway-and-Russ/id476347/>

GRØHOLT, E. M. (2016). SLOVO. *From conflictual to cooperative approaches in Russian foreign policy – an examination of the Barents Sea Boundary Agreement* , 26-47.

Henriksen, T., & Ulfstein, G. (2011). Ocean Development & International Law. *Maritime Delimitation in the Arctic: The Barents Sea Treaty* , 1-21.

Hoel, A. H. (2012). Nordlit 29. *THE 2010 NORWAY – RUSSIA MARINE BOUNDARY AGREEMENT AND BILATERAL COOPERATION ON INTEGRATED OCEANS MANAGEMENT* .

Hruzdou, M. J. (2011). XXXI POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW. *MARITIME DELIMITATION IN THE BARENTS SEA AND INTERNATIONAL PRACTICE IN MARITIME DELIMITATION* , 0554-498X.

- Lazare, A. A. (2009). *THE CONCEPT OF EQUIDISTANCE/RELEVANT CIRCUMSTANCES IN THE DEVELOPMENT OF THE LAW OF MARITIME DELIMITATION*. Malmö, Sweden: WORLD MARITIME UNIVERSITY.
- López, J. A. (2015, January 15). *Oxford Bibliography*. Retrieved March Sunday, 2018, from Oxford Bibliography:
- Moe, A., & Fjærtøft, D. (2011). Polar Geography. *Space and timing: why was the Barents Sea delimitation dispute resolved in 2010* , 145-162.
- Moe, Arild, 2004: *The Northern Areas – Resources and Interests*, Gesprächskreis, Nördliche Gebiete, Berlin November 8.
- Moe, A. (nd). Russian and Norwegian Petroleum Strategies in the Barents Sea. *Arctic Review on Law and Politics* , 225-248.
- Okwonko, T. (2017). Beijing Law Review. *Maritime Boundaries Delimitation and Dispute Resolution in Africa* , 8, 55-78.
- Research, I. .: (2010, September 17). *Norway and Russia sign historic maritime boundary agreement*. Retrieved October 13, 2018, from Boundary News: https://www.dur.ac.uk/ibru/news/boundary_news/?itemno=10741
- Rottem, Ø. J. (2009). Polar Record. *The politics of security and international law in Norway's Arctic Waters* , 75-83.
- Sergunin, V. K. (2014). Journal of International Relations and Foreign Policy. *Russia's Policies on the Territorial Disputes in the Arctic* , 55-83.
- Stein, A. A. (2008). Neoliberal Institutionalism. *The Oxford Handbook on International Relations* , 201–221.
- Tukhvatullin, M. (2017). MASTER THESIS. *Norwegian-Russian petroleum cooperation in the Barents Sea in the Arctic context* , 67.
- Witte, N. (2013). INQUIRIES JOURNAL. *The Barents Sea Conflict: Russia and Norway Competing Over Fossil Fuel Riches in the Arctic* , 3/5.
- (2010). *Joint Statement on maritime delimitation and cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean*. Oslo: Foreign Minister Kingdom of Norway and Foreign Minister of Russian Federation.
- (2015). *Law and Best Practices for Maritime Boundary Delimitations*. Jakarta: Summary Report Workshop.